

DOKUMEN

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**(SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL
PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT)**

KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN

**PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

TAHUN 2003

DOKUMEN

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**(SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL
PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT)**

KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN

**PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

TAHUN 2003

DAFTAR ISI

NO	URAIAN
1.	TERM OF REFERENCES
2.	SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
3.	PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN LANGSUNG/LELANG
4.	BERITA ACARA PENGADAAN BARANG/JASA
5.	PERMOHONAN PERSETUJUAN PENUNJUKAN LANGSUNG
6.	PERSETUJUAN PENUNJUKAN LANGSUNG BADAN/LEMBAGA/ PERGURUAN TINGGI
7.	UNDANGAN AANWIJZING
8.	BERITA ACARA PENJELASAN/AANWIJZING
9.	INSTITUTION PROFILE
10.	SURAT PENAWARAN
11.	BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
12.	UNDANGAN NEGOISASI
13.	BERITA ACARA NEGOISASI
14.	SURAT KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
15.	SURAT PENUNJUKAN LANGSUNG PELAKSANA SUB KEGIATAN
16.	JADUAL PENELITIAN DAN PROSENTASE HASIL PEKERJAAN
17.	SURAT PERINTAH KERJA
18.	SURAT PENYERAHAN LAPANGAN
19.	SURAT PERINTAH MULAI KERJA
20.	SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
21.	PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PEKERJAAN

TERM OF REFERENCES

**IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2003



DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

TAHUN 2003

TERM OF REFERENCES

IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Latar Belakang

Sesuai Visi dan Misi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2001-2005 yaitu "Menjadi pengelola Pendapatan Daerah yang amanah serta berorientasi pada kepuasan pelayanan publik", hal ini berarti pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan publik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Pengelolaan Pendapatan Daerah terutama dari unsur Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun ke tahun selalu meningkat serta mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah di Propinsi Jawa Barat dibanding dengan unsur Pajak Daerah lainnya.

Dalam pelayanan kepada masyarakat, secara simultan berbagai upaya untuk peningkatan pelayanannya terutama berkaitan dengan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat telah diupayakan, namun tingkat capaian kinerja pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB tersebut, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, perlu untuk diidentifikasi sebagai dasar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah mengidentifikasi kinerja operasional di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat dalam melaksanakan pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan ini:

- 1) Melaksanakan identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat. Hal-hal yang diidentifikasi dibatasi dalam lingkup Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, terdiri dari:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Sarana dan Prasarana;
 - d. Koordinasi;
- 2) Pembuatan laporan identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat;
- 3) Penyusunan saran dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan laporan hasil identifikasi.

Output Pekerjaan

Output dari pekerjaan identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat ini adalah berupa Buku Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat Yang berisikan:

1. Hasil identifikasi terhadap kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;
2. Saran dan Rekomendasi untuk peningkatan kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat berdasarkan kesimpulan hasil identifikasi baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Jangka Waktu Pekerjaan

Pekerjaan identifikasi ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender atau 27 (dua puluh tujuh) minggu kalender.

Biaya Pekerjaan

Untuk melaksanakan pekerjaan identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat ini di anggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Biaya tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003, Kode Rekening 01.05.03-075.06-2.1.2 yang termuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 yang sudah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.143-Dal.Prog/2003 tanggal 18 Maret 2003 dan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat.

Pemimpin Pelaksana Kegiatan,

RAKHMAT SUPRIATNA, SE. MSI
NIP. 480 116 442

**KEPUTUSAN PEMIMPIN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Nomor : 01/Keg.Pen.PAD/V/2003

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
SUB KEGIATAN PENDATAAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) / BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB),
SUB KEGIATAN PENDATAAN POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN SERTA
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) / BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan serta Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Personalia pelaksanaan kegiatan dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa jabatan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk mengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 004 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1305-Dal.Prog/2002 Tanggal 5 Nopember 2002 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.143/Dal.Prog/2003 Tanggal 18 Maret 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 di Lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 954/Kep.79-Keu/2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Penunjukan/Penetapan Pemimpin Pelaksana Kegiatan/ Bagian Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas/Bagian Kegiatan pada Dinas/Lembaga Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003.
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1365-Dal.Prog./2002 Tanggal 3 Nopember 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 PERTAMA : Pejabat-pejabat yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab dan Pembina Program, Penanggung Jawab dan Pembina Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pemegang Kas, Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi dan Pramubakti, dalam Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat ;

KEDUA : Tugas Unsur Organisasi Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab dan Pembina Program :

Bertanggung jawab dalam pembinaan program/Kegiatan pembangunan dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya dengan tugas :

- a. Menyusun dan menandatangani petunjuk tertulis antara lain berisi :
 - (1) Tujuan, sasaran dan rincian kegiatan;
 - (2) Rincian penggunaan dana dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan;
 - (3) Jadwal kegiatan untuk mencapai sasaran;
 - (4) Rincian lokasi dan alokasi dana serta kegiatan untuk masing-masing Sub Kegiatan;
 - (5) Petunjuk-petunjuk lainnya.
- b. Menyelenggarakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas (Kasir);
- c. Memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Penanggung jawab dan Pembina Pelaksana Kegiatan

2. Penanggung Jawab dan Pembina Pelaksana Kegiatan dengan tugas:

- a. Melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan;
- b. Menyelenggarakan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan;
- c. Memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan

3. Pemimpin Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan mencantumkan namanya dalam DASK dan atau dokumen lain yang disamakan, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, baik dari segi keuangan, maupun segi kegiatan sesuai dengan DASK;
- b. Tidak mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DASK;
- c. Bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - e. Mengangkat panitia pengadaan jasa dengan pihak ketiga;
 - f. Menyerahkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pembantu Pemegang Kas (kasir) Kegiatan adalah Pejabat yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dengan mencantumkan namanya dalam DASK dan atau dokumen lain yang disamakan, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Pemegang Kas sesuai dengan tugas pekerjaannya
 - b. Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Pemegang Kas;
 - c. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada Pemegang Kas;
 - d. Melakukan tugas lain dari Pemegang Kas.
 5. Pelaksana Teknis mempunyai tugas ;
 - a. Membantu Pemimpin Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan teknis berupa kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. Melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan.
 6. Pelaksana Administrasi dengan tugas:
 - a. Membantu Pemimpin Pelaksana Kegiatan dalam mempersiapkan Administrasi Kegiatan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan;
 - c. Sebagai fungsi pencatat, pelaporan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan.

- KETIGA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- KELIMA : Segala Pembiayaan dari Dana Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Mei 2003

**Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemimpin Pelaksana,**



RAKHMAT SUPRIATNA, S.E., M.Si.
Penata Muda Tk.I
NIP. 480 116 442

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dispenda Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Kepala Sub Dinas Pajak Dispenda Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bapak Kepala Biro Bina Penyusun Program Setda Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Nomor : 01/Keg.Pen.PAD/V/2003.
Tanggal : 1 Mei 2003
Tentang : Susunan Organisasi dan Personalia Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

I. Penanggung Jawab dan Pembina : Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Program.

II. Penanggung Jawab dan Pembina : Kepala Sub Dinas Pajak Pelaksana.

III. Pemimpin Pelaksana Kegiatan : RAKHMAT SUPRIATNA, SE, MSi

IV. Pembantu Pemegang Kas (Kasir) : LILIS ATIA

V. Pelaksana Teknis : Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Se Jawa Barat

1. N. Ida Hamidah, SE, M.Si
2. Drs. Suparman

Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Se Jawa Barat

1. Dra. Iis Siti Nurtista Somantri
2. Drs. H. Eman Suhendar

Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

1. Drs. Totoh Hermanto, SmHk
2. Drs. H. Aceng Kurdi

- VI. Pelaksana Administrasi : Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Se Jawa Barat
- Aam Dhani Laksana
- Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Se Jawa Barat
- Yayi Rahmat
- Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat
- Suhandi
- VII. Pengemudi : Dedi
- VIII. Pramubakti : Irma

**Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemimpin Pelaksana,**



RAKHMAT SUPRIATNA, SE, MSi.
Penata Muda Tk.I
NIP. 480 116 442

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.**

Nomor : 01/Keg.Pen.PAD/V/2003.
Tanggal : 1 Mei 2003
Tentang : Susunan Organisasi dan Personalia Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Serta Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

BESARNYA UANG HONORARIUM PER BULAN PERSONALIA
KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

SUB KEGIATAN PENDATAAN POTENSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) / BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB) SE JAWA BARAT

No.	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab dan Pembina Program.	Rp. -	
2.	Penanggung Jawab dan Pembina Kegiatan.	Rp. 140.000,-	
3.	Pimpinan Pelaksana Kegiatan.	Rp. 120.000,-	
4.	Pembantu Pemegang Kas (Kasir).	Rp. 110.000,-	
5.	Pelaksana Teknis	Rp. 90.000,-	
6.	Pelaksana Administrasi	Rp. 80.000,-	
7.	Pengemudi	Rp. 75.000,-	
8.	Pramubakti	Rp. 65.000,-	

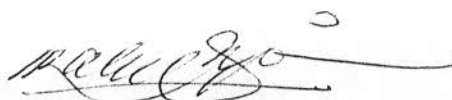
SUB KEGIATAN PENDATAAN POTENSI PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN SE JAWA BARAT

No.	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Pelaksana Teknik	Rp. 90.000,-	
2.	Pelaksana Administrasi	Rp. 80.000,-	
3.	Pengemudi	Rp -	
4.	Pramubakti	Rp -	

SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL
PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB) / BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

No.	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Pelaksana Teknik	Rp. 90.000,-	
2.	Pelaksana Administrasi	Rp. 80.000,-	
3.	Pengemudi	Rp. -	
4.	Pramubakti	Rp. -	

**Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pemimpin Pelaksana,**



RAKHMAT SUPRIATNA, SE, MSi
Penata Muda Tk. I
NIP. 480 116 442

**LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.**

Nomor : 01/Keg.Pen.PAD/V/2003.
Tanggal : 1 Mei 2003
Tentang : Susunan Organisasi dan Personalia Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sub Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**



**SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

NOMOR: 01/IKOPP/V/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN LANGSUNG/LELANG
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN
PEMUNGUTAN PKB/BBNKB
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SEJAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat, maka perlu dibentuk Panitia Penunjukan Langsung/Lelang dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata -Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1305-Dal.Prog/2002 Tanggal 5 Nopember 2002 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1365-Dal.Prog/2002 Tanggal 5 Nopember 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003;
8. Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2002 tanggal 5 Nopember 2002 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.143-Dal.Prog/2003 Tanggal 18 Maret 2003 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 di Lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 954/Kep.04-Keu/2003 Tanggal 2 Januari 2003 tentang Penunjukan/Penetapan Atasan Langsung Pemimpin Pelaksana Kegiatan Pemegang Kas, Pimpinan Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Bagian Pelaksana Kegiatan/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas (Kasir, Pembukuan dan Verifikasi) pada Dinas/Lembaga/Badan/Kantor/Satuan Kerja Propinsi Jawa Barat serta PUMC pada Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penunjukan Langsung/Lelang Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Mereka yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penunjukan Langsung/Lelang tersebut dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagaimana tertera pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2003

Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

Pemimpin Pelaksana,



Rakhmat Supriatna, SE, MSi
Penata Muda Tk.I
NIP. 480 116 442

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dispenda Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Kepala Sub Dinas Pajak Dispenda Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bapak kepala Biro Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) / BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

NOMOR : 01/IKOPP/V/2003.

TANGGAL : 5 Mei 2003

TENTANG : Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung/Lelang Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB Di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

I. Ketua : Dra. Hj. Emma Siti Fatima

II. Sekretaris : Dra. Isnariani

III. Anggota : 1. Drs. Totoh Hermanto, SmHk
2. Drs. Suparman
3. Eem Sujaemah, SH

Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

Pemimpin Pelaksana,



Rakhmat Supriatna, SE, MSi
Penata Muda Tk.I
NIP. 480 116 442

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

BERITA ACARA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : 01/PAN-IKOPP/V/2003

Pada hari ini, Selasa Tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu tiga, dimulai pukul 09.00 s.d. 14.00 bertempat di ruang Rapat Sub Dinas Bina Program Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung, kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat yang terdiri dari :

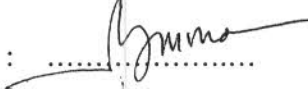
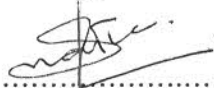
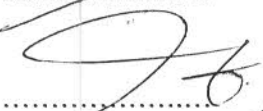
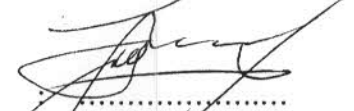
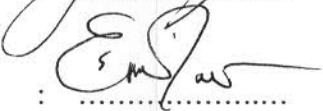
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

- | | | |
|------------------------------|---------|------------|
| 1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima | Jabatan | Ketua |
| 2. Dra. Isnariani | Jabatan | Sekretaris |
| 3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk | Jabatan | Anggota |
| 4. Drs. Suparman | Jabatan | Anggota |
| 5. Eem Sujaemah, SH | Jabatan | Anggota |

Telah mengadakan rapat untuk membuat kajian dalam pengadaan pekerjaan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat. Hasil kajian terlampir.

Rapat ditutup oleh Ketua Panitia tepat pukul 14.00 WIB dan Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa ini ditandatangani oleh seluruh Panitia yang hadir.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

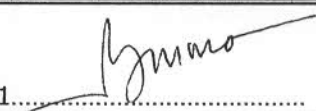
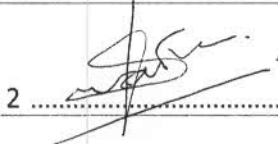
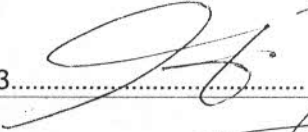
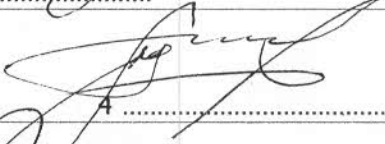
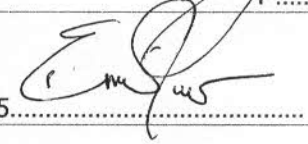
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima | : |  |
| Ketua | | |
| 2. Dra. Isnariani | : |  |
| Sekretaris | | |
| 3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk | : |  |
| Anggota | | |
| 4. Drs. Suparman | : |  |
| Anggota | | |
| 5. Eem Sujaemah, SH | : |  |
| Anggota | | |

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat

DAFTAR HADIR

HARI : SELASA
TANGGAL : 6 MEI 2003
TEMPAT : RUANG SUB BINA PROGRAM
ACARA : RAPAT KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Ketua Panitia	1. 
2	Dra. Isnariani	Sekretaris	2. 
3	Drs. Totoh Hermanto, Sm.Hk	Anggota	3. 
4	Drs Suparman	Anggota	4. 
5	Eem Sujaemah, SH	Anggota	5. 
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.

Bandung, 14 Mei 2003

Nomor : 973 / 432 -Dispenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Persetujuan
Penunjukan Langsung.**

Kepada :
Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
melalui
Kepala Biro Pengendalian
Program Setda Propinsi
Jawa Barat

di.

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan "*Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat*" Tahun Anggaran 2003 yang pelaksanaannya akan dikerjasamakan melalui proses penunjukan langsung sesuai Keppres nomor 18 tahun 2000 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Nasional nomor S-42/A/2000 dan Keputusan Gubernur nomor 38 tahun 2002 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Adapun dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan dengan cara penunjukan langsung adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat yang terkait dengan Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero), sehingga terdapat *Security Administrative* yang harus dijaga kerahasiannya berkaitan Instansi tersebut terutama Kepolisian;
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat segera mengingat hasilnya akan dijadikan dasar dalam:
 - 1) Penyusunan target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2004 yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 38 tahun 2002 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002;

- 2) Untuk menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang berkembang dewasa ini dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Dinas.
3. Pelaksanaan kegiatan akan dikerjasamakan dengan salah satu lembaga/Perguruan Tinggi yang telah mengadakan kesepakatan kerjasama penelitian dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Naskah Kesepakatan Jaringan Kerjasama Informasi Penelitian (JARLIT) tertanggal 10 Oktober 1988;
4. Hasil dari kegiatan ini merupakan kajian ilmiah yang akan dijadikan dasar perbaikan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Kepala Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003.

Demikian kiranya Bapak dapat menyetujui permohonan ini, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Plh. KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROPINSI JAWA BARAT, T



H. TATANG PRIDASA, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 480 058 021

KAJIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

1. Bahwa personil di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat yang akan dijadikan objek identifikasi kinerja pelayanan terdiri dari 3 (tiga) unsur/instansi yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang saling terkait, namun mempunyai wewenang dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh ke tiga unsur tersebut. Pelaksanaan kegiatan identifikasi kinerja pelayanan yang akan di lakukan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat jangan sampai mengganggu *Security Administrative* dari masing-masing instansi, lebih khusus lagi mengenai kerahasiaan administrasi Kepolisian. Oleh karena itu kegiatan yang akan kami laksanakan tidak bisa terlalu terbuka secara umum, namun dilakukan dengan penunjukan langsung kepada lembaga/Perguruan Tinggi yang betul-betul memahami keberadaan Kantor Bersama Samsat;
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat segera mengingat hasilnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2004 sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur nomor 38 tahun 2002 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 serta untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut yang harus diambil oleh Dinas dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat di bidang peningkatan pelayanan yang dewasa ini pelaksanaannya sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka apabila kegiatan tersebut diproses melalui prosedur pelelangan secara umum akan memakan waktu lama.
3. Kegiatan identifikasi kinerja pelayanan ini merupakan kajian ilmiah mengenai penelitian yang bersifat spesifik, maka dalam memilih mitra kerjasama harus dengan lembaga/Perguruan Tinggi yang sudah berpengalaman di bidang ini dan sudah mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat seperti tercantum dalam Naskah Kesepakatan Jaringan Kerjasama Informasi Penelitian (JARLIT) tertanggal 10 Oktober 1988, sehingga penunjukan langsung yang akan kami laksanakan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada;
4. Hasil dari kegiatan identifikasi kinerja pelayanan ini merupakan kajian ilmiah yang akan dijadikan dasar dalam perbaikan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan perkembangan baru sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bandung, 12 Mei 2003

TIM KAJIAN

1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima
Ketua
2. Dra. Isnariani
Sekretaris
3. Drs. Totoh Hermanto, Sm Hk
Anggota
4. Drs. H. Suparman
Anggota
5. Eem Sujaemah, SH
Anggota

()

()

()

()

()

RENCANA ANGGARAN BELANJA
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN
PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI KANTOR BERSAMA SAMSAT
SE JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2003

	Jumlah
Belanja Pegawai / Personalia	9,590,000
Honorarium / Upah	6,580,000
Insentif	3,010,000
Belanja Barang dan Jasa	278,185,000
Biaya Bahan / Material	900,000
Biaya Jasa Pihak ketiga	272,505,000
Biaya Jasa tenaga Kerja Non Pegawai (Dikerjasamakan)	271,505,000
Biaya Dokumentasi	1,000,000
Biaya Cetak dan Penggandaan	1,000,000
Biaya Makanan dan Minuman	3,780,000
Belanja Perjalanan Dinas	12,225,000
Belanja Perjalanan Dinas	12,225,000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,225,000
	300,000,000

Bandung, Mei 2003

Plh. Kepala Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Barat



H. TATANG PRIDASA, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 480 058 021



Nomor : 602.21/1458-Dal.Prog.
Sifat : Segera.
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Penunjukan Langsung
Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi.**

Bandung, 21 Mei 2003
Kepada :
Yth. **Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Barat**
di-

BANDUNG

Menunjuk Surat dari Plh. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat,
Nomor : 973/432-Dispenda, tanggal 14 Mei 2003 perihal Permohonan Persetujuan
Penunjukan Langsung, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.143-Dal.Prog/2003, tanggal 18 Maret 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat khususnya Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdapat Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 dengan Kode Rekening 01.05.02-075.06, akan dilaksanakan dengan prosedur Penunjukan Langsung Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi.
2. Penunjukan Langsung tersebut akan dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kegiatan dimaksud, merupakan Pekerjaan/kegiatan yang terkait dengan Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero), sehingga terdapat *Security Administrative* yang harus dijaga kerahasiaannya berkaitan dengan instansi tersebut terutama kepolisian dan akan dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat.
 - b. Bahwa kegiatan dimaksud merupakan pekerjaan yang bersifat segera mengingat hasilnya dapat menunjang pencapaian target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2003 dan menjadi dasar dalam Penyusunan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2004.
 - c. Bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang berkembang saat ini, dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Dinas.
 - d. Bahwa hasil dari kegiatan ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan dasar kajian ilmiah dalam perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat serta dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengetahui atau mengkaji dalam Penyusunan Target Pendapatan Pajak Daerah.

Sehubungan dengan butir 1, dan 2 di atas, pada prinsipnya kami memahami maksud Saudara bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat, dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung dengan Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Adapun

Adapun dalam pelaksanaannya diminta perhatian Saudara, sebagai berikut :

1. Agar Pihak Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi dimaksud, secara prosedural harus memenuhi persyaratan, baik administrasi maupun teknis.
2. Agar memperhatikan tata cara dan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Nasional No. S - 42 / A / 2000 Jo SKB Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas No. S-2262/D2/052000 No. Kep. 97/KM.2/2002 No. 289/M.PPN/03/2002
3. Agar memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep. 1365-Dalprog/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003.
3. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat ketidakbenaran alasan secara teknis ditempuhnya pemilihan langsung, tidak dimilikinya kompetensi oleh pelaksana kegiatan, adanya cacat yang tersembunyi dalam menentukan calon pelaksana kegiatan dan proses administrasi yang mengandung pemalsuan atau terjadinya penyimpangan, maka Kepala Dinas harus mempertanggungjawabkannya secara penuh.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan penuh tanggung jawab.

A.n. GUBERNUR JAWA BARAT
Sekretaris Daerah,


Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si.
Pembina Utama
NIP. 010 054 068

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala BAPEDA Propinsi Jawa Barat, di Bandung
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Prop. Jabar, di Bandung.
3. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat, di Bandung.
4. Yth. Sdr. Pemimpin Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, di Bandung.

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 - 7568928 BANDUNG 40286

Bandung, 22 Mei 2003

Nomor : 02/PAN-IKOPP/V/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Aanwijzing**

Kepada :
Yth. Bapak Kepala Pusat Kajian dan
Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Cimandiri Nomor 34-38
Di

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat kami bermaksud untuk bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara yang Bapak pimpin. Apabila bapak berkenan bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud kami mengundang Bapak untuk mengikuti Rapat Penjelasan (Aanwijzing) pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Mei 2003
Waktu : 13.30 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Sub Dinas Pajak
Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat
Jl. Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat
Ketua,



Dra. Hj. Emma Siti Fatima
Penata Tingkat I
NIP. 480 103 950

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

Bandung, 22 Mei 2003

Nomor : 02/PAN-IKOPP/V/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Aanwijzing**

Kepada :
Yth. Bapak Kepala Pusat Kajian dan
Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Cimandiri Nomor 34-38
Di

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat kami bermaksud untuk bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara yang Bapak pimpin. Apabila bapak berkenan bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud kami mengundang Bapak untuk mengikuti Rapat Penjelasan (Aanwijzing) pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Mei 2003
Waktu : 13.30 s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Sub Dinas Pajak
Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat
Jl. Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat
Ketua,



Dra. Hj. Emma Siti Fatima
Penata Tingkat I
NIP. 480 103 950

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

BERITA ACARA PENJELASAN/AANWIJZING

Nomor : 03/PAN-IKOPP/V/2003

Pada hari ini, Jum'at Tanggal dua puluh tiga Bulan mei Tahun dua ribu tiga, dimulai pukul 13.30 s.d. 15.30 bertempat di ruang Rapat Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung, kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat yang terdiri dari :

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Jabatan	Ketua
2. Dra. Isnariani	Jabatan	Sekretaris
3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk	Jabatan	Anggota
4. Drs. Suparman	Jabatan	Anggota
5. Eem Sujaemah, SH	Jabatan	Anggota

Telah mengadakan rapat untuk memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tentang pekerjaan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat. Acara pemberian penjelasan (Aanwijzing) pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- I. PEMBUKAAN
- II. PENJELASAN TERM OF REFERENCES (TOR)
- III. PENUTUP

I. PEMBUKAAN

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dra. Hj. Emma Siti Fatima selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dimulai pukul 13.30 WIB dan selain dihadiri oleh anggota panitia dihadiri juga oleh perwakilan dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara yaitu :

1. Baban Sobandi, SE, MSi	Jabatan	Peneliti
2. Joni Dawud, Drs. DEA	Jabatan	Peneliti
3. Dayat Hidayat, Drs	Jabatan	Peneliti

II. PENJELASAN TERM OF REFERNCES (TOR)

Penjelasan *Term Of References (TOR)* dijelaskan oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup Pekerjaan;
4. Output Pekerjaan;
5. Jangka Waktu Pekerjaan;
6. Biaya Pekerjaan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Ketua Panitia tepat pukul 15.30 WIB dan Berita Acara Aanwijzing ini ditandatangani oleh seluruh Panitia yang hadir serta wakil dari Lembaga.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

Wakil
Pusat Kajian Dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

Baban Sobandi, SE, MSi
Peneliti

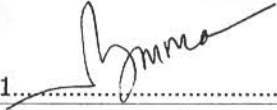

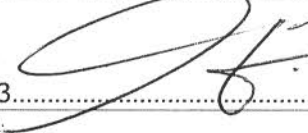
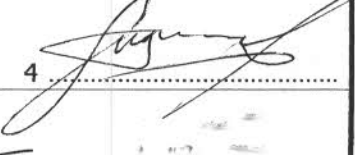
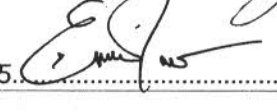
1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima :
Ketua
2. Dra. Isnariani :
Sekretaris
3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk :
Anggota
4. Drs. Suparman :
Anggota
5. Eem. Sujaemah, SH :
Anggota

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat

DAFTAR HADIR

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 23 MEI 2003
TEMPAT : RUANG SUB BINA PROGRAM
ACARA : AANWIJZING

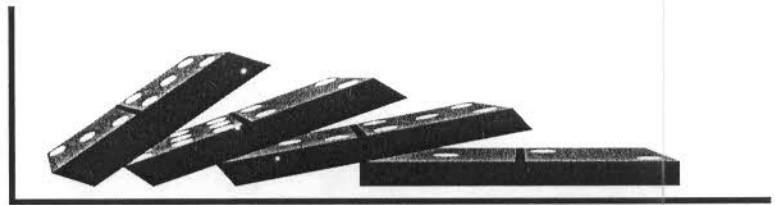
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Ketua Panitia	1. 
2	Dra. Isnariani	Sekretaris	2. 
3	Drs. Totoh Hermanto, Sm.Hk	Anggota	3. 
4	Drs Suparman	Anggota	4. 
5	Eem Sujaemah, SH	Anggota	5. 
6	Baban Sobandi, SE, MSi	LAN-RI	6.
7	Drs. Joni Dawud, DEA	LAN-RI	7.
8	Drs. Dayat Hidayat	LAN-RI	8.
9			9.
10			10.



INSTITUTION PROFILE

BIDANG KKSDA dan KMKPOA

PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2003



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penyusunan "Institutional Profile" Bidang Kajian kinerja Kelembagaan & SDA (KKSDA) dan Bidang Kajian Manajemen Kebijakan, Pelayanan dan Otomasi Administrasi Negara (KMKPOA) di Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I (KSDA I) Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi instansi-instansi pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, dan lembaga-lembaga pengkajian ilmu sosial mengenai lingkup kajian dan kinerja penelitian, pengembangan dan konsultasi administrasi yang dilaksanakan selama ini.

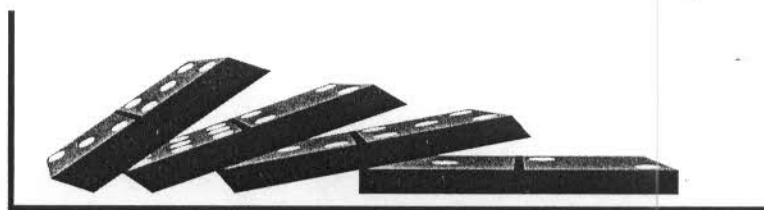
Optimalisasi kinerja yang dicapai selama ini, tentu bukan semata-mata merupakan perwujudan dari pengerahan segenap sumber daya Bidang Kajian KKSDA dan KMKPOA sendiri, melainkan lebih sebagai hasil sinergi dari kekuatan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika segenap kiprah positif tersebut kami anggap perlu untuk dituliskan kedalam Buku Profil ini.

Kami berharap bahwasannya buku kecil ini dapat menjadi wahana "perkenalan" antara Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I LAN Bandung dengan institusi yang berkepentingan, disertai harapan semoga kerjasama yang telah terbina selama ini dapat lebih ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Kepala,

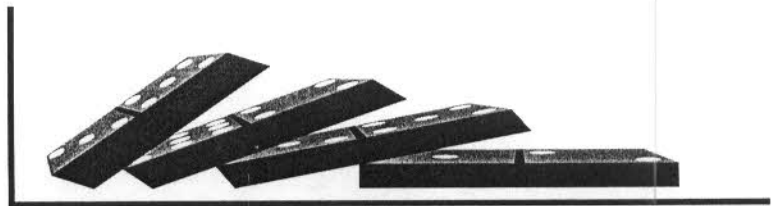
DR. Djuaeni Kadmasasmita, SE, M.Ec.



Daftar Isi

I N S T I T U T I O N P R O F I L E

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Data Kelembagaan	5
Tugas Pokok dan Fungsi	7
Visi dan Misi	9
Tantangan dan Peluang	11
Sumber Daya Manusia	14
Sumber Daya Lainnya	17
Jangkauan dan Substansi	19
Jaringan Kerja	22
Kinerja	24
Penutup	31



Data Kelembagaan

Kantor :

Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Jl. Cimandiri No. 34 – 38 Bandung 40115

☎ (022) 4237375

Fax (022) 4207678

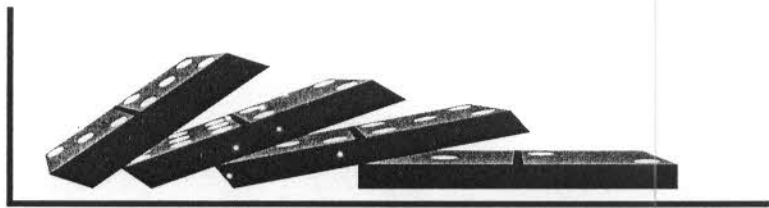
E-mail : lanbdg@bdg.centrin.net.id

Dasar Hukum :

- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen
- Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

Status Institusi :

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden

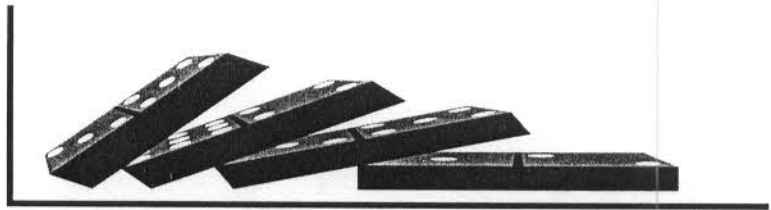


Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001, PKDA I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kajian serta pendidikan dan pelatihan aparatur negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (pasal 119 a). Dalam melaksanakan tugas tersebut, PKDA I menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Penyelenggaraan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah .
2. Penyelenggaraan pengkajian kebijakan administrasi negara yang meliputi bidang pemerintahan umum, pembangunan, perekonomian negara dan manajemen pelayanan.
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.
5. Pengelolaan sumber daya Pusat bagi terlaksananya tugas Pusat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang KKSDA dan KMKPOA ditujukan untuk mencapai atau mewujudkan sebagian tugas pokok dan fungsi PKDA I diatas. Adapun PKDA I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Tugas pokok LAN sendiri adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Keputusan Kepala LAN No. 171/IX/6/4/2001).



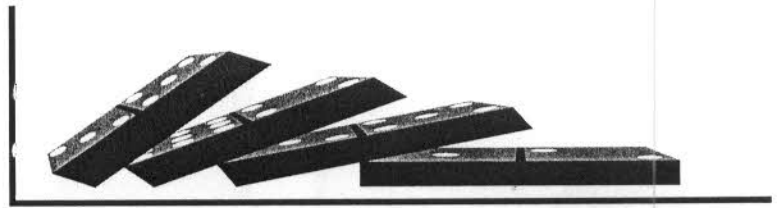
Visi dan Misi

Visi

“Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Konsultasi Administrasi Menuju Terwujudnya Praktek Sistem Administrasi Negara dan Niaga yang Modern dan Profesional Abad 21 Demi Peningkatan Mutu Pelayanan Umum”

Misi

1. Menyelenggarakan Kegiatan Penelitian Administrasi yang Aktual, Tajam, Obyektif, serta SMART (*Specific* atau Spesifik, *Measurable* atau Dapat Diukur, *Achievable* atau Dapat Dicapai, *Relevant* atau Relevan, and *Timed* atau Jelas Penentuan Batas Waktunya) –baik Kualitatif maupun Kuantatif.
2. Melakukan Pengkajian Pengembangan Organisasi Publik dan Privat untuk Mengatasi CHAOS (*Confusion* atau Kebingungan, *Hassles* atau Perselisihan, *Anger* atau Ketegangan, *Obstruction* atau Hambatan, and *Static* atau Kemandekan).
3. Memberikan dan Menyajikan Konsultasi Administrasi yang Ramah, Mudah, Cepat, serta Bermanfaat, dengan Mengindahkan Prinsip SWOT (*Strength* atau Kekuatan, *Weakness* atau Kelemahan, *Opportunity* atau Peluang, and *Threat* atau Tantangan).



Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang KKSDA dan KMKPOA dihadapkan kepada Tantangan sebagai berikut :

1. Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia (aparatur, pelaku ekonomi maupun masyarakat) yang relatif masih rendah dibanding negara ASEAN dan negara maju lainnya, sehingga kurang memiliki daya saing di dunia internasional.
2. Struktur Kelembagaan Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang relatif masih *birokratis*, panjang dan piramidal, serta kurang efektif dan efisien.
3. Jumlah penduduk miskin dan tidak terdidik yang relatif masih tinggi, yang mencerminkan masih panjangnya tugas pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Kinerja Badan Usaha Milik Negara yang relatif masih merugi.
5. Program Kemitraan sektor publik dengan sektor privat yang belum optimal, dan sebagainya.

Adapun peluang yang dimiliki untuk dapat mengeliminasi tantangan tersebut adalah :

1. Dukungan Tenaga Ahli dan Peneliti yang berpengalaman di bidang Administrasi, baik sebagai Akademisi maupun Praktisi.
2. Kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan berbagai instansi pemerintah, BUMN maupun Swasta.
3. Kebijakan pemerintah (baik formulasi maupun implementasi) yang serius, hati-hati dan terus-menerus untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan. Dalam hal inipun, Bidang Litbang LAN memberikan kontribusi yang positif.

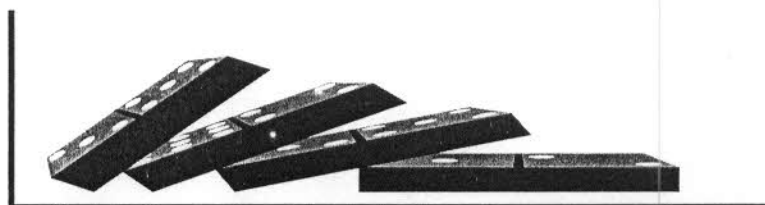
Dengan demikian,

Tantangan Konkrit bagi Bidang KKSDA dan KMKPOA
adalah:

*“Bagaimana Mengubah Kondisi Tersebut Diatas
Menjadi Peluang ?”*

“Bagaimana Mengubah Peluang Menjadi Keuntungan ?”

“Bagaimana Mengubah Keuntungan Menjadi Kesejahteraan ?”



Sumber Daya Manusia

Tenaga pendukung Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I Bandung
terdiri dari :

Kepala PKDA I Bandung :

- DR. A. Djuaeni Kadmasasmita, SE., M.Ec.

Kepala Bidang KKSDA :

- Drs. Ara Ruhara

Kepala Bidang KMKPOA :

- Drs. Wahyu Gia Uliantoro, MT. MRP.

Peneliti Senior :

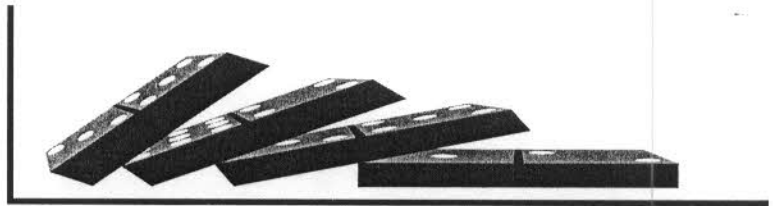
- Dra. Jat Jat E. Wirijadinata, Mag.rer.Publ.
- Dra. Endang Wirjatmi Tri Lestari, M.Si.
 - DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd.
 - Drs. Desi Fernandha, M.Soc.Sc.
 - Dra. Hj. Hayuni Rachmawati
 - Baban Sobandi, SE, M.Si.
 - Drs. Joni Dawud, DEA
- Drs. Nugraha Lili Nujiana, SE.,M.Si.

Pembantu Peneliti :

- Kania Damayanti, SE.,MPP.
- Drs. Awang Anwarudin, M.Ed.
- Drs. H. Jusuf Taudjiri, M.Pd.
- Drs. Soetarto Mochtar, MA.
- Wawan Dharma Setiawan, SH
 - Drs. Syarifudin Hidayat
 - Ir. Budi Setiawan
- Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.
 - Dra. Enni Iriani, M.Ed.
 - Ir. Ely Sufianti, MA.
 - Drs. Dayat Hidayat
 - Dra. Teni Listiani
 - Drs. Ramdani Priatna
 - Ir. Euis Nurmalia
 - Ir. Ratnaningsih
- Drs. Sabar Gunawan, M.Ed.
 - Gugum Gumelar, SH.
 - Anita Ilyas, S.Sos.
 - Zulpikar, S.Sos.
 - Siti Mariam, S.Sos.
 - Desi Deliana, S.Sos.

Staf Sekretariat :

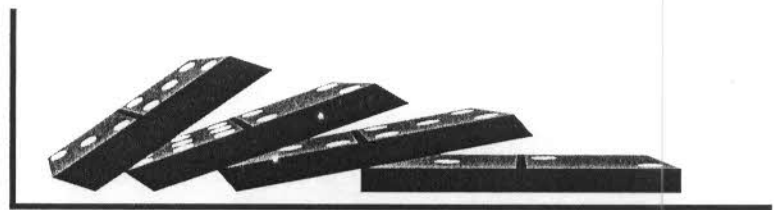
- Ade Juariah, S.Sos.
- Novel Saleh Seff
 - Holidin



Sumber Daya Lainnya

Alat-alat dan atau fasilitas penunjang kerja Bidang KKSDA dan KMKPOA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Ruangan “Laboratorium Kemitraan” Full AC
 - 1 (satu) Ruang Diskusi VIP
 - Perpustakaan Mini
 - 1 (satu) Unit Komputer Acer Pentium
 - 3 (tiga) Unit Komputer GTC Pentium
 - 2 (dua) Unit Komputer Emerald 486 DX
 - 1 (satu) Laptop Toshiba Pentium
 - 1 (satu) Unit Laser Jet Printer Hewlett Packard 4 P
 - 2 (dua) Unit Desk Jet Printer Hewlett Packard 500
 - 1 Unit Mobil Kijang D 17 AH
 - 1 (satu) Unit Canofile
 - 1 (satu) buah Sony Handy Cam
 - 2 (dua) buah Over Head Projector
- Sarana penunjang lain seperti Filing Cabinet, Meja Kursi Commando, Almari Buku, dan sebagainya.



Jangkauan dan Substansi

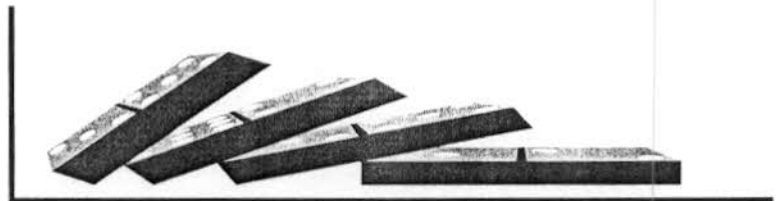
Jangkauan Kerja dan atau Wilayah Kerja Bidang KKSDA dan Bidang KMKPOA PKDA I Bandung - Jawa Barat meliputi seluruh Daerah Tingkat I di Indonesia dengan fokus :

- Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
- Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
 - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
 - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Propinsi Daerah Tingkat I Bali
- Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
- Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
 - Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
 - Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
- Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Beberapa daerah lain, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dibina oleh Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta dan atau oleh PKDA II Sulawesi Selatan

Adapun substansi kajian yang menjadi kompetensi dan konsentrasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Administrasi Pemerintahan Pusat
- Administrasi dan Otonomi Pemerintahan Daerah
 - Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan
- Manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Analisis Kebijakan
- Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
- Strategi Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Ekonomi Pembangunan
 - Pengembangan dan Penataan Organisasi
 - Manajemen BUMN dan BUMD
 - Privatisasi dan Restrukturisasi Sektor Publik
 - Manajemen Perkotaan
- Penyusunan Pola Dasar Pembangunan, Repelita dan Indikator Pembangunan
 - Manajemen Perubahan
 - Manajemen Pelayanan Umum
- Administrasi dan atau Manajemen Kepegawaian
 - Manajemen Proyek
- Administrasi dan atau Manajemen Perkantoran
 - Manajemen Informasi Sektor Publik



Jaringan Kerja



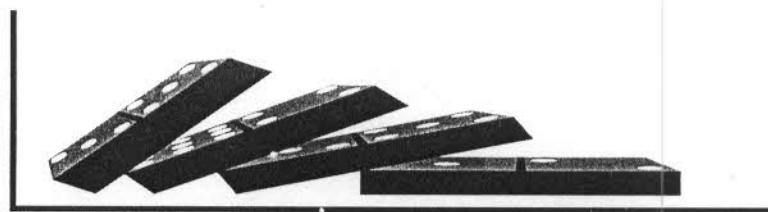
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I Bandung menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkait sebagai berikut :

- LAN Pusat
- Kantor Menko EKUIN / Bappenas
 - Departemen Dalam Negeri
 - Departemen Keuangan
 - Kantor Sekretariat Negara

Instansi tersebut diatas sekaligus merupakan “*Stake Holders*” dari eksistensi Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I Bandung Jawa Barat.

Disamping itu, instansi pemerintah dan swasta yang selalu menjalin kerjasama dengan Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I Bandung adalah :

- Bappeda Pemerintah Propinsi
- Bappeda Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten
- Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten
 - Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
 - BUMN dan BUMD



Kinerja

Secara kelembagaan, Bidang KKSDA dan Bidang KMKPOA (sebelumnya adalah bidang Penelitian dan Pengembangan LAN Perwakilan Jawa Barat) telah menerima penghargaan berupa **Anugerah Jurnalistik** dari Menteri Penerangan dan Ketua PWI Pusat dalam rangka Harkitnas tahun 1994.

Bidang KKSDA dan KMKPOA juga menerbitkan kajian ilmiah populer "**Wacana Kinerja**" per Triwulan, yang berisi pemikiran konseptual empirik mengenai administrasi pembangunan dan pemerintahan, kebijakan publik, kemitraan dan pemberdayaan sektor privat, otonomi daerah, dan sebagainya.

Disamping itu, baik melalui proyek APBN (DIP) maupun program kerja rutinnya, Bidang KKSDA dan KMKPOA telah menghasilkan berbagai kajian dan penelitian multidisipliner, dengan luas jangkauan seluruh Indonesia, dengan kerjasama lintas sektoral, serta dengan sumber pendanaan yang beragam, sebagaimana dapat disimak dari daftar sebagai berikut.

DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN DAN KONSULTANSI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Tahun 1993/94 - 2002

No	Jenis / Nama Kegiatan	Tahun	Sumber Anggaran	Kerjasama
1.	Kajian tentang Daerah Dengan Karakteristik Khusus	2002	APBN	PKDA I
2.	Kajian tentang Model Kerjasama Antar Daerah	2002	APBN	PKDA I
3.	Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sumedang	2002	APBD	Pemda Sumedang
4.	Kajian Kemampuan Sumber Daya Aparatur Daerah	2001	APBN	LAN
5.	Kajian Peningkatan Pelayanan Kebersihan di Kawasan Perkotaan	2001	APBN	LAN
6.	Kajian Manajemen Pemerintahan Kota Bandung	2001	APBD	Pemda Kota Bandung
7.	Identifikasi Pengembangan Dekonsentrasi Dalam Memperkokoh Implementasi Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Barat	2001	APBD	Pemda Propinsi Jawa Barat
8.	Rincian Kewenangan Daerah Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi	2001	APBD	Pemda Propinsi Jawa Barat

I N S T I T U T I O N P R O F I L E

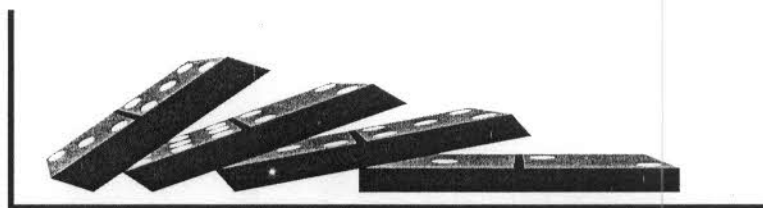
No	Jenis / Nama Kegiatan	Tahun	Sumber Anggaran	Kerjasama
9.	Kajian Kebijakan Tentang Pemerintahan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999	2000	APBN	LAN
10.	Kajian Model Kelembagaan Kawasan Perkotaan	2000	APBN	LAN
11.	Kajian Kebijakan Transportasi Kawasan Perkotaan	2000	APBN	LAN
12.	Penelitian tentang Prospek Re-strukturisasi Fungsi Pelayanan Umum Kelembagaan Pemerintah di Daerah Dalam Rangka Pengembangan Kemitra Usahaan Dengan Sektor Swasta	1999-2000	APBN	Lembaga Administrasi Negara
13.	Penelitian tentang Identifikasi Penataan Administrasi Pemerintahan Kota-Kota Baru di Jawa Barat	1999-2000	APBD Tingkat I Jabar	Biro Otda Setwilda Tingkat I Jawa Barat
14.	Kajian tentang Kewenangan dan Kelembagaan Daerah Sebagai Implikasi Pemberlakuan UU 22 Tahun 1999 di Jawa Barat	1999-2000	APBD Tingkat I Jabar	Biro Otda Setwilda Tingkat I Jawa Barat
15.	Kajian tentang Penyusunan Studi Kelembagaan IPAL – Cisirung	1999-2000	APBN	Bapedal
16.	Penelitian tentang Pengembangan Kebijaksanaan Pola Penilaian Kinerja Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II.	1998-1999	APBN	Lembaga Administrasi Negara

17.	Penelitian tentang Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Negara	1997-1998	APBN	Lembaga Administrasi Negara
18.	Penelitian tentang Pola Penilaian Kinerja Pelayanan Umum Aparat Dinas Daerah Tingkat II	1997-1998	APBN	Lembaga Administrasi Negara
19.	Penelitian tentang Pemetaan Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Masyarakat	1997-1998	APBN	Lembaga Administrasi Negara
20.	Penelitian tentang Identifikasi Masalah yang dihadapi Daerah Tingkat II dalam Era Perdagangan Bebas dan Investasi	1997-1998	APBN	Lembaga Administrasi Negara
21.	Penelitian tentang Peningkatan Status Kemantren di Kab. Daerah Tingkat II Bandung	1997-1998	APBD Tingkat I Jabar	Bappeda Tk. I Jawa Barat
22.	Penelitian tentang Evaluasi Diklat PNS di Daerah	1996-1997	APBN	Lembaga Administrasi Negara
23.	Penelitian tentang Evaluasi Mid Term Repelita VI Sektor Aparatur Negara	1996-1997	APBN	Lembaga Administrasi Negara
24.	Penelitian tentang Pokok-Pokok Perancangan Repelita VII Sektor Aparatur Negara	1996-1997	APBN	Lembaga Administrasi Negara

I N S T I T U T I O N P R O F I L E

No	Jenis / Nama Kegiatan	Tahun	Sumber Anggaran	Kerjasama
25.	Penyusunan Modul Penataan Organisasi Daerah Tingkat II se Jawa Barat	1996-1997	APBD Tk. I Jabar	Setwilda Tk I Jabar / Biro Organisasi
26.	<i>Public Information Campaign</i> dalam rangka Bogor Palembang UDP	1995-1996	APBD Tk. II	Kab/Kodya Bogor-Kodya Palembang-UDP
27.	Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem UU Nomor 5 / 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	1995-1996	APBN	Lembaga Administrasi Negara
28.	Studi tentang Dampak Pembangunan Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat di Jawa Barat	1995-1996	APBN	Lembaga Administrasi Negara
29.	Evaluasi Kelembagaan mengenai Manfaat Proyek BUDP I dan BUDP II	1994-1995	APBD Tk. II	Kodya Tk. II Bandung / Proyek BUDP I dan II
30.	Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan APBN	1994-1995	APBN	Lembaga Administrasi Negara
31.	Penelitian tentang Penyusunan Jabatan Fungsional Perencana	1994-1995	APBN	Lembaga Administrasi Negara

No	Jenis / Nama Kegiatan	Tahun	Sumber Anggaran	Kerjasama
32.	Penelitian tentang Pola Kelembagaan Aparatur Daerah Tingkat I dan II dalam rangka Desentralisasi dan Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II	1994-1995	APBN	Lembaga Administrasi Negara
33.	Penelitian tentang Penyempurnaan Sistem UU Nomor 5 / 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	1994-1995	APBN	Lembaga Administrasi Negara
34.	Penelitian tentang Sistem Perijinan di Kawasan Industri	1993-1994	APBN	Lembaga Administrasi Negara



P e n u t u p

Segenap pendukung Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I LAN Bandung selalu berharap dan bertekad mengusahakan peningkatan kemampuan kerja dan hasil kerja (kinerja) Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I khususnya dan Lemabaga Administrasi Negara umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang KKSDA dan KMKPOA PKDA I Bandung selalu menyambut gembira uluran tangan dari berbagai pihak untuk bertukar informasi dan menjalin kerjasama demi kemajuan ilmu dan praktek administrasi di Indonesia.

Tercapainya sistem administrasi negara dan aparatur negara yang berdayaguna merupakan sinergi yang menjadi cita-cita akhir segenap pendukung PKDA I LAN Bandung.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I

Nomor : 310A/V/2.1/2003
Lampiran : -
Perihal : **Surat Penawaran**

Bandung, 26 Mei 2003

Kepada
Yth. Pimpinan Pelaksana Kegiatan
Jl. Soekarno Hatta No. 528
Bandung

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan penjelasan/aanwijzing tanggal 23 Mei 2003 untuk kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat, maka Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara menawarkan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 284.500.000,- (Dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Kepala,

Dr. A. Djuaeni Kadmasasmita, SE.,M.Ec.
NIP. 060 034 417

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 04/PAN-IKOPP/V/2003

Pada hari ini, Senin Tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu tiga, dimulai pukul 09.00 s.d. 12.00 bertempat di Ruang Rapat Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung, kami Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat telah mengadakan evaluasi terhadap Surat Penawaran Nomor 310A/V.2.1/2003 dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara dengan uraian sebagai berikut:

A. Rapat dipimpin oleh: Dra. Hj. Emma Siti Fatima
Jabatan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

B. Hadir dalam acara evaluasi tersebut:

1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Jabatan	Ketua
2. Dra. Isnariani	Jabatan	Sekretaris
3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk	Jabatan	Anggota
4. Drs. Suparman	Jabatan	Anggota
5. Eem Sujaemah, SH	Jabatan	Anggota

B. Dengan hasil evaluasi penawaran adalah sebagai berikut:

1. Harga Penawaran yang diajukan sebesar Rp. 284.500.000,00 (Terbilang: Dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Biaya yang akan dikerjasamakan berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dispenda Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 yang telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor 910/KEP.143/DALPROG/2003 pekerjaan termaksud diatas adalah sebesar Rp. 272.505.000,00 (Terbilang: Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah)

Berdasarkan perbedaan Harga Penawaran dengan dana yang tersedia didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), perlu diadakan negoisasi harga dengan lembaga tersebut diatas dengan limit anggaran belanja sesuai Harga Perhitungan Sendiri (OE) yang telah disusun Panitia antara sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 272.505.000,00 (Terbilang: Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Ketua	
2.	Dra. Isnariani	Sekretaris	
3.	Drs. Totoh Hermanto, SmHk	Anggota	
4.	Drs. Suparman	Anggota	
5.	Eem Sujaemah, SH	Anggota	

Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat

HARI : SENIN
TANGGAL : 26 MEI 2003
TEMPAT : RUANG SUB BINA PROGRAM
ACARA : EVALUASI SURAT PENAWARAN

[illegible]

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 - 7568928 BANDUNG 40286

BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 06/PAN-IKOPP/V/2003

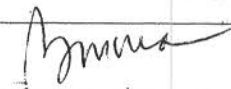
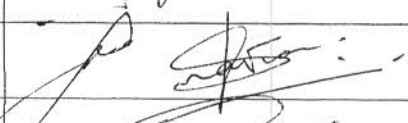

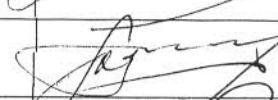
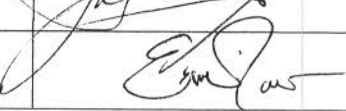
Pada hari ini, Selasa Tanggal dua puluh tujuh Bulan mei Tahun dua ribu tiga, dimulai pukul 09.00 s.d. 12.00 bertempat di Ruang Rapat Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung, kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat telah mengadakan klarifikasi/negosiasi terhadap Usulan Teknis dan Usulan Biaya dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara dengan uraian sebagai berikut:

- A. Rapat dipimpin oleh: Dra. Hj. Emma Siti Fatima
Jabatan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
- B. Hadir dalam Panitia:
- a. Unsur Panitia
- | | | |
|------------------------------|---------|------------|
| 1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima | Jabatan | Ketua |
| 2. Dra. Isnariani | Jabatan | Sekretaris |
| 3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk | Jabatan | Anggota |
| 4. Drs. Suparman | Jabatan | Anggota |
| 5. Eem Sujaemah, SH | Jabatan | Anggota |
- b. Wakil dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara yaitu:
- | | | |
|---------------------------|---------|----------|
| 1. Baban Sobandi, SE, MSi | Jabatan | Peneliti |
| 2. Joni Dawud, Drs. DEA | Jabatan | Peneliti |
| 3. Dayat Hidayat, Drs | Jabatan | Peneliti |
- C. Dengan hasil klarifikasi/Negosiasi sebagai berikut:
1. Harga Penawaran semula yang diajukan sebesar Rp. 284.500.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Harga Negosiasi yang disepakati adalah sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Negosiasi biaya berdasarkan pertimbangan dana yang tersedia didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Anggaran Belanja dan Harga Perhitungan Sendiri (OE) yang telah disusun Panitia. Harga Negosiasi adalah cukup wajar dan menguntungkan Negara setelah negosiasi ini calon pelaksana yang bersangkutan harus membuat surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga tersebut di atas, yang merupakan harga pasti dan tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Ketua	
2.	Dra. Isnariani	Sekretaris	
3.	Drs. Totoh Hermanto, SmHk	Anggota	
4.	Drs. Suparman	Anggota	
5.	Eem Sujaemah, SH	Anggota	

Wakil dari Lembaga:

Nama : Dayat Hidayat, Drs
Jabatan : Peneliti
Lembaga : Pusat Kajian Dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

(.....)

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 - 7568928 BANDUNG 40286

BERITA ACARA NEGOISASI

Nomor : 06/PAN-IKOPP/V/2003

Pada hari ini, Selasa Tanggal dua puluh tujuh Bulan mei Tahun dua ribu tiga, dimulai pukul 09.00 s.d. 12.00 bertempat di Ruang Rapat Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung, kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat telah mengadakan klarifikasi/negosiasi terhadap Usulan Teknis dan Usulan Biaya dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara dengan uraian sebagai berikut:

A. Rapat dipimpin oleh: Dra. Hj. Emma Siti Fatima
Jabatan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa

B. Hadir dalam Panitia:

a. Unsur Panitia

1. Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Jabatan	Ketua
2. Dra. Isnariani	Jabatan	Sekretaris
3. Drs. Totoh Hermanto, SmHk	Jabatan	Anggota
4. Drs. Suparman	Jabatan	Anggota
5. Eem Sujaemah, SH	Jabatan	Anggota

b. Wakil dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara yaitu:

1. Baban Sobandi, SE, MSi	Jabatan	Peneliti
2. Joni Dawud, Drs. DEA	Jabatan	Peneliti
3. Dayat Hidayat, Drs	Jabatan	Peneliti

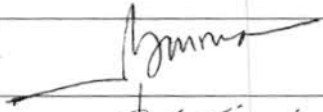

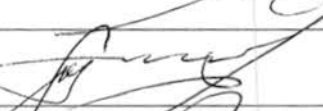
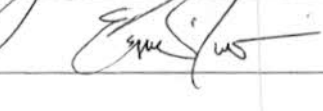

C. Dengan hasil klarifikasi/Negosiasi sebagai berikut:

1. Harga Penawaran semula yang diajukan sebesar Rp. 284.500.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Harga Negoisasi yang disepakati adalah sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Negosiasi biaya berdasarkan pertimbangan dana yang tersedia didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Anggaran Belanja dan Harga Perhitungan Sendiri (OE) yang telah disusun Panitia. Harga Negoisasi adalah cukup wajar dan menguntungkan Negara setelah negoisasi ini calon pelaksana yang bersangkutan harus membuat surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga tersebut di atas, yang merupakan harga pasti dan tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Ketua	
2.	Dra. Isnariani	Sekretaris	
3.	Drs. Totoh Hermanto, SmHk	Anggota	
4.	Drs. Suparman	Anggota	
5.	Eem Sujaemah, SH	Anggota	

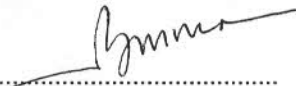
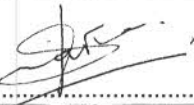
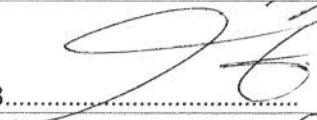
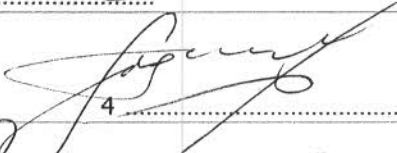
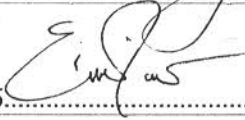
Wakil dari Lembaga:

Nama : Dayat Hidayat, Drs
Jabatan : Peneliti
Lembaga : Pusat Kajian Dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

(.....)

Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat

HARI : SELASA
TANGGAL : 27 MEI 2003
TEMPAT : RUANG SUB BINA PROGRAM
ACARA : NEGOISASI HARGA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra. Hj. Emma Siti Fatima	Ketua Panitia	1. 
2	Dra. Isnariani	Sekretaris	2. 
3	Drs. Totoh Hermanto, Sm.Hk	Anggota	3. 
4	Drs Suparman	Anggota	4. 
5	Eem Sujaemah, SH	Anggota	5. 
6	Baban Sobandi, SE, MSi	Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I - LANRI	6.
7	Drs. Joni Dawud, DEA	Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I - LANRI	7.
8	Drs. Dayat Hidayat	Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I - LANRI	8.
9			9.
10			10.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I

Nomor : 322A/V/2.1/2003
Lampiran : -
Perihal : **Surat Kesanggupan
Melaksanakan Kegiatan**

Bandung, 28 Mei 2003

Kepada
Yth. Pimpinan Pelaksana Kegiatan
Jl. Soekarno Hatta No. 528
Bandung

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil negosiasi tanggal 26 Mei 2003 untuk kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat, maka Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara menyanggupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Kepala,

Dr. A. Djuaeni Kadmasasmita, SE.,M.Ec.
NIP. 060 034 417

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

Bandung, 28 Mei 2003

Nomor : 02/IKOPP/V/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Langsung
Pelaksana Sub Kegiatan**

Kepada :
Yth. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja
Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama
Samsat Se Jawa Barat
di

BANDUNG

Sehubungan dengan Berita Acara Saudara Nomor 01/PAN-
IKOPP/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 perihal Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa, Berita Acara Nomor 04/PAN-IKOPP/V/2003 tanggal
26 Mei 2003 perihal Penelitian/Evaluasi Penawaran Harga dan Berita Acara
Nomor 06/PAN-IKOPP/V/2003 tanggal 27 Mei 2003 perihal Negoisasi
Harga serta Surat dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga
Administrasi Negara Nomor 322A/V.2.1/2003 perihal Kesanggupan
Melaksanakan Pekerjaan maka sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat
nomor 602.21/1458-Dal.Prog. tanggal 21 Mei 2003 perihal Persetujuan
Penunjukan Langsung Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi, kami menunjuk
langsung sebagai pelaksana pekerjaan termaksud yaitu:

Nama Lembaga	: Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Cimandiri Nomor 34-38 Bandung
NPWP	:
Harga Penawaran Semula	: Rp. 284.500.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
Harga Negoisasi	: Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Demikian kiranya maklum dan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih

Pemimpin Pelaksana
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat



Rakhmat Supriatna, SE, MSi
Penata Tingkat I
NIP. 480 116 442

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

Bandung, 28 Mei 2003

Nomor : 02/IKOPP/V/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Langsung
Pelaksana Sub Kegiatan**

Kepada :
Yth. Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja
Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama
Samsat Se Jawa Barat
di

BANDUNG

Sehubungan dengan Berita Acara Saudara Nomor 01/PAN-
IKOPP/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 perihal Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa, Berita Acara Nomor 04/PAN-IKOPP/V/2003 tanggal
26 Mei 2003 perihal Penelitian/Evaluasi Penawaran Harga dan Berita Acara
Nomor 06/PAN-IKOPP/V/2003 tanggal 27 Mei 2003 perihal Negoisasi
Harga serta Surat dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga
Administrasi Negara Nomor 322A/V.2.1/2003 perihal Kesanggupan
Melaksanakan Pekerjaan maka sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Barat
nomor 602.21/1458-Dal.Prog. tanggal 21 Mei 2003 perihal Persetujuan
Penunjukan Langsung Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi, kami menunjuk
langsung sebagai pelaksana pekerjaan termaksud yaitu:

Nama Lembaga	: Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Cimandiri Nomor 34-38 Bandung
NPWP	:
Harga Penawaran Semula	: Rp. 284.500.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
Harga Negoisasi	: Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Demikian kiranya maklum dan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih

Pemimpin Pelaksana
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat



Rakhmat Supriatna, SE, MSI
Penata Tingkat I
NIP. 480 116 442

PKB/BBNKB KANTOR BERSAMA SAMSAT SE-JAWA BARAT

[illegible]

PERINTAH KERJA

Nomor: 04/IKOPP/V/2003

PEMIMPIN PELAKSANA

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN

**IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT**

**DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT
BANDUNG**

2003

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung Telp. 7566197 – 7568928 BANDUNG 40286

PERINTAH KERJA

Nomor: 04/IKOPP/V/2003

PEMIMPIN PELAKSANA

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN
IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Memerintah kepada:

Nama Lembaga : Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Kepala Lembaga : Dr. A. DJUAENI K, SE, M.Ec
Alamat : Jl. Cimandiri Nomor 34-38 Bandung
NPWP : 00.220.349.5-424.000

Untuk memenuhi pelaksanaan:

Pekerjaan : Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

Lokasi : Di 31 Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat, yang meliputi:

1. UPPD Prop. Wilayah I (Depok);
2. UPPD Prop. Wilayah II (Cibinong);
3. UPPD Prop. Wilayah III (Bogor);
4. UPPD Prop. Wilayah IV (Sukabumi)
5. UPPD Prop. Wilayah V (Cibadak);
6. UPPD Prop. Wilayah VI (Pelabuhanratu);
7. UPPD Prop. Wilayah VII (Cianjur);
8. UPPD Prop. Wilayah VIII (Bekasi);
9. UPPD Prop. Wilayah IX (Cikarang);
10. UPPD Prop. Wilayah X (Karawang);

11. UPPD Prop. Wilayah XI (Purwakarta);
12. UPPD Prop. Wilayah XII (Subang);
13. UPPD Prop. Wilayah XIII (Cirebon);
14. UPPD Prop. Wilayah XIV (Sumber)
15. UPPD Prop. Wilayah XV (Ciledug);
16. UPPD Prop. Wilayah XVI (Indramayu);
17. UPPD Prop. Wilayah XVII (Haurgeulis);
18. UPPD Prop. Wilayah XVIII (Kuningan);
19. UPPD Prop. Wilayah XIX (Majalengka);
20. UPPD Prop. Wilayah XX (Bandung Barat);
21. UPPD Prop. Wilayah XXI (Bandung Tengah);
22. UPPD Prop. Wilayah XXII (Bandung Timur);
23. UPPD Prop. Wilayah XXIII (Padalarang);
24. UPPD Prop. Wilayah XXIV (Rancaekek);
25. UPPD Prop. Wilayah XXV (Sumedang);
26. UPPD Prop. Wilayah XXVI (Garut);
27. UPPD Prop. Wilayah XXVII (Tasikmalaya);
28. UPPD Prop. Wilayah XXVIII (Sukaraja);
29. UPPD Prop. Wilayah XXIX (Ciamis);
30. UPPD Prop. Wilayah XXX (Pangandaran);
31. UPPD Prop. Wilayah XXXI (Cimahi).

Dana : APBD Propinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2003
Nilai Kontrak : Rp. 270.000.000,00
(dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan : 130 (seratus tiga puluh) hari kalender.
Terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.

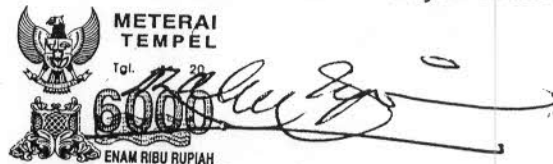
Dengan ketentuan:

1. Pekerjaan lapangan baru dapat dimulai setelah Pelaksana menerima Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;

3. Segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan ini telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) yang sudah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Mei 2003

Pemimpin Pelaksana
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional
Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB
di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat



Rakhmat Supriatna, SE, MSI
Penata Tingkat I
NIP. 480 116 442

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Kepala Dispenda Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Kepala Sub Dinas Bina Program Dispenda Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bapak Kepala Sub Dinas Pajak Dispenda Propinsi Jawa Barat.

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung Telp. (022) 7566197-7568928 Fax : (022) 7564880

PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 06/IKOPP/VI/2003

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga, Pemimpin Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat, menyerahkan lapangan kepada:

Nama : Dr. A. DJUAENI K., SE, M.Ec
Jabatan : Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
A l a m a t : Jl. Cimandiri Nomor 34 - 38 Bandung.

Sebagai pelaksana dalam pekerjaan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/IKOPP/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 dalam jangka waktu 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

YANG MENERIMA LAPANGAN:

Kepala
Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara



Dr. A. DJUAENI K., SE, M.Ec

YANG MENYERAHKAN LAPANGAN:

Pemimpin Pelaksana
Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan
Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

RAKHMAT SUPRIATNA, SE, MSI
NIP. 480 116 442

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung Telp. (022) 7566197-7568928 Fax : (022) 7564880

PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 05/IKOPP/V/2003

Pemimpin Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

Memerintahkan :

Kepada :

Nama : Dr. A. DJUAENI K., SE, M.Ec
Jabatan : Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl. Cimandiri Nomor 34- 38 Bandung.

Untuk memenuhi pelaksanaan :

Pekerjaan : Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat

Lokasi : 31 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi yang
meliputi :

- 1 UPPD Propinsi Wilayah I (Depok)
- 2 UPPD Propinsi Wilayah II (Cibinong)
- 3 UPPD Propinsi Wilayah III (Bogor)
- 4 UPPD Propinsi Wilayah IV (Sukabumi)
- 5 UPPD Propinsi Wilayah V (Cibadak)
- 6 UPPD Propinsi Wilayah VI (Palabuhanratu)
- 7 UPPD Propinsi Wilayah VII (Cianjur)
- 8 UPPD Propinsi Wilayah VIII (Bekasi)
- 9 UPPD Propinsi Wilayah IX (Cikarang)
- 10 UPPD Propinsi Wilayah X (Karawang)
- 11 UPPD Propinsi Wilayah XI (Purwakarta)
- 12 UPPD Propinsi Wilayah XII (Subang)
- 13 UPPD Propinsi Wilayah XIII (Cirebon)
- 14 UPPD Propinsi Wilayah XIV (Sumber)
- 15 UPPD Propinsi Wilayah XV (Ciledug)
- 16 UPPD Propinsi Wilayah XVI (Indramayu)

- 17 UPPD Propinsi Wilayah XVII (Haurgeulis)
- 18 UPPD Propinsi Wilayah XVIII (Kuningan)
- 19 UPPD Propinsi Wilayah XIX (Majalengka)
- 20 UPPD Propinsi Wilayah XX (Bandung Barat)
- 21 UPPD Propinsi Wilayah XXI (Bandung Tengah)
- 22 UPPD Propinsi Wilayah XXII (Bandung Timur)
- 23 UPPD Propinsi Wilayah XXIII (Padalarang)
- 24 UPPD Propinsi Wilayah XXIV (Rancaekek)
- 25 UPPD Propinsi Wilayah XXV (Sumedang)
- 26 UPPD Propinsi Wilayah XXVI (Garut)
- 27 UPPD Propinsi Wilayah XXVII (Tasikmalaya)
- 28 UPPD Propinsi Wilayah XXVIII (Sukaraja)
- 29 UPPD Propinsi Wilayah XXIX (Ciamis)
- 30 UPPD Propinsi Wilayah XXX (Pangandaran)
- 31 UPPD Propinsi Wilayah XXXI (Cimahi)

D a n a : APBD
Tahun Anggaran : 2003
Nilai Kontrak : Rp. 270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan : 130 (Seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Mei 2003 sampai dengan 5 Oktober 2003.

Dengan ketentuan:

1. Pekerjaan lapangan baru dapat dimulai setelah menerima Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen penunjukan langsung;

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2003

Pemimpin Pelaksana
Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan
Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan
PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat



RAKHMAT SUPRIATNA, SE, MSI
NIP. 480 116 442

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

NOMOR : 325A / V.2.1/2003
03/IKOPP/VI/2003

ANTARA

**PEMIMPIN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL
PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT)**

DENGAN

**PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

TAHUN ANGGARAN 2003

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
ANTARA
PEMIMPIN PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)/BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT
DENGAN
PUSAT KAJIAN DAN DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : $\frac{325A/V.2.1/2003}{03/IKOPP/VI/2003}$

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu tiga di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rakhmat Supriatna, SE, M.Si : Pemimpin Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 954/Kep.04-Keu/2003, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. A. Djuaeni K, SE, M.Ec : Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Cimandiri Nomor 34-38 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Objek Perjanjian**

- 1) Melaksanakan identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat;
- 2) Pembuatan laporan identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat;
- 3) Penyusunan saran dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan laporan hasil identifikasi.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban Pihak PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berupa Laporan hasil identifikasi kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat serta saran dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja operasional pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat se Jawa Barat untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 perjanjian kerjasama ini;
 - b. Menyediakan *counterpart* sebagai pendamping dan narasumber bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya, sebesar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 perjanjian kerjasama ini.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 perjanjian ini;
 - b. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini sesuai dengan proposal teknis yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - c. Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini disepakati selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung mulai penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 5

Pembiayaan

Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003.

Pasal.6

Tata Cara Pembayaran

- 1) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Jabar (Jl. Suci) dimana PIHAK KEDUA tercatat sebagai nasabah dengan nomor rekening 24.00.01.000643.0 atas nama Dra. ARA RUHARA/EUIS NURMALIA, berdasarkan beban kode rekening 01.05.03-075.06-2.1.2.02.02.01

- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:
- a. Pembayaran Tahap PERTAMA $15\% \times \text{Rp. } 270.000.000,00 = \text{Rp. } 40.500.000,00$ setelah pekerjaan mencapai 20%;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua $20\% \times \text{Rp. } 270.000.000,00 = \text{Rp. } 54.000.000,00$ setelah pekerjaan mencapai 40%;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga $65\% \times \text{Rp. } 270.000.000,00 = \text{Rp. } 175.500.000,00$ setelah pekerjaan selesai (100%) atau diserahkan Laporan hasil Akhir pelaksanaan identifikasi.

Pasal 7

Pemilikan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

- 1) Semua hasil pekerjaan yang telah dibuat berdasarkan perjanjian ini yaitu berupa laporan-laporan, disket/CD ROM yang berisikan laporan-laporan dan lain-lainnya yang terkait dalam pekerjaan ini diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya;
- 2) Hasil pekerjaan berupa buku laporan pekerjaan beserta dokumen lainnya sebanyak 50 buku harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.

Pasal 8

Resiko

- 1) Bilamana hasil pekerjaan ternyata menurut PIHAK PERTAMA belum memenuhi syarat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus mengulangi dan memperbaikinya atas beban biaya PIHAK KEDUA, sesuai petunjuk PIHAK PERTAMA;
- 2) Bilamana terjadi keterlambatan akibat kelalaian PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2) huruf b perjanjian ini, maka atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan maksimum sebesar nilai jaminan pelaksanaan.

Pasal 9
Keadaan Kahar (Force Majeure)

- 1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- 2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - c. Peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh PIHAK KEDUA dan dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis sebagai peristiwa yang mempunyai akibat langsung terhadap tertundanya penyelesaian pekerjaan.
- 3) Setiap keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 2) pasal ini harus dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 10
Bea Materai

Bea materai maupun biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Perselisihan

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase yang keanggotaannya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, seorang wakil dari PIHAK KEDUA dan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 3) Keputusan Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat 2) pasal ini bersifat final yang harus ditaati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Dokumen Kerjasama

- 1) Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini merupakan ketentuan serta bagian yang tidak terpisahkan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
- 2) Yang dimaksud dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini adalah dokumen yang ada saat dimulai, selama dan sesudah perjanjian ini dilaksanakan kedua belah pihak.

Pasal 13
Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara



Dr. A. DJUAENI K, SE, M.Ec
NIP. 06004417

PIHAK PERTAMA

Pemimpin Pelaksana Kegiatan

RAKHMAT SUPRIATNA, SE, MSI
NIP. 480 116 442

DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

**(SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PKB/BBNKB DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT)**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Nomor 528 Bandung Telp. (022) 7566197-7569828 : (022) 7564880

KEPUTUSAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

NOMOR: 07/IKOPP/VI/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PEKERJAAN
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN
PKB/BBNKB DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT**

PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN

- Menimbang:
- a. berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 954/kep.04-keu/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penunjukan/Penetapan Atasan Langsung Pemegang Kas/Pemimpin Pelaksana Kegiatan/Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas (kasir, Pembukuan dan Verifikasi) pada Dinas/Lembaga/Badan/Kantor/Satuan kerja Propinsi Jawa Barat serta PUMC pada Sekretariat Daerah untuk Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat, maka perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Pekerjaan dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
 - b. bahwa jabatan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk mengelola sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1305-Dal.Prog/2002 Tanggal 5 Nopember 2002 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 22 November 2002 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 954/Kep.4-Keu/2003 Tanggal 2 Januari 2003 tentang Penunjukan/Penetapan Atasan Langsung Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas (Kasir, Pembukuan dan Verifikasi) pada Dinas/Lembaga/Badan/Kantor/ Satuan Kerja Propinsi Jawa Barat serta PUMC pada Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2003;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.143/Dal.Prog/2003 Tanggal 18 Maret 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan (DASK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 di Lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan Identifikasi Kinerja Operasional Pelayanan Pemungutan PKB/BBNKB di Kantor Bersama Samsat Se Jawa Barat;
- KEDUA** : Mereka yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) pada Lampiran Keputusan ini diangkat sebagaimana tertera pada Kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Pemeriksa Pekerjaan dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia berakhir setelah kegiatan selesai atau sesuai dengan masa kerja penugasannya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 03 Juni 2003

**PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL
PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI
KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT,**



RAKHMAT SUPRIATNA
Penata Muda Tingkat I
NIP. 480 116 442

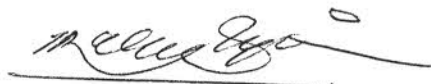
Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Dispenda Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bapak Kepala Sub Dinas Bina Program Dispenda Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bapak Kepala Biro Pengendalian Program Pengendalian Program Setda Propinsi Jawa Barat
4. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA
OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI KANTOR
BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT,
NOMOR : 07/IKOPP/VI/2003
TANGGAL : 03 JUNI 2003
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PEKERJAAN KEGIATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI
KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI
KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT

SUB KEGIATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3
IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT	H. AGUS RAKHMAT, SH Drs. H. ACENG KURDI ROSMINI SUHANDI FEBI FEBRIADI	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI KINERJA OPERASIONAL
PELAYANAN PEMUNGUTAN PKB/BBNKB DI
KANTOR BERSAMA SAMSAT SE JAWA BARAT,



RAKHMAT SUPRIATNA
Penata Muda Tingkat I
NIP : 480 116 442

